

# Konflik Bupati dan Wabup Sidoarjo Meruncing, Mimik Berencana Laporkan Subandi ke Kemendagri

Konflik Bupati dan Wabup Sidoarjo Meruncing, Mimik Berencana Laporkan Subandi ke Kemendagri

Tim Redaksi

**SIDOARJO, KOMPAS.com** - Masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi dan Mimik Idayana, belum genap satu tahun. Tetapi, keduanya telah beberapa kali diwarnai isu tak harmonis.

Keretakan tonggak kepemimpinan Pemkab [Sidoarjo](#) ini semakin memuncak ketika Mimik berencana melaporkan Subandi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pasangan Subandi-Mimik dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo pada 20 Februari 2025. Kini, jabatan yang diemban keduanya belum genap satu tahun.

**Baca juga:** [Berseteru Soal Mutasi ASN, Wabup Bakal Laporkan Bupati Sidoarjo ke Kemendagri](#)

Keduanya diusung oleh Partai Gerindra, Demokrat dan Golkar serta sejumlah partai lainnya dengan mendulang suara unggul 58 persen dari lawannya, Achmad Amir Aslichin dan Edi Widodo.

Baru satu bulan dilantik, tepatnya pada Maret 2025, Subandi pernah menyebut tugas dewan menghambur-hamburkan uang rakyat. Ucapan tersebut menuai reaksi panas di kalangan kursi fraksi.

**Baca juga:** [Akan Dilaporkan Wabup Sidoarjo Mimik, Bupati Subandi: Tak Ada Jual Beli Jabatan](#)

Setidaknya, fraksi Gerindra, PAN, PDIP, PKB, PKS, PPP, Nasdem, Demokrat menuntut Subandi melakukan klarifikasi dan meminta maaf saat rapat paripurna pada 10 Juni 2025.

DPD Golkar dan Gerindra Jatim lalu meminta keduanya untuk kembali berhubungan dan menjalin komunikasi dengan baik. Namun, fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo menolak permintaan maaf Subandi.

Hal ini lantaran Mimik sebagai Ketua DPC Gerindra Sidoarjo kerap merasa diabaikan dalam pengambilan keputusan penting seperti soal penyusunan Perbup terkait insentif pajak dan pengelolaan P3K.

**Baca juga: [Penampakan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Kenakan Rompi Pink Kejagung](#)**

Namun, Mimik membantah terkait kabar tak harmonis tersebut. Ia menegaskan hubungan keduanya baik dan saling berkomitmen membangun Kabupaten Sidoarjo.

"Hoaks, *seng retak iku sopo sih* (siapa sih yang retak). Media sendiri (yang menggoreng). Saya bersama Pak Subandi sudah berkomitmen memajukan dan kesejahteraan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo," kata Mimik, Rabu (25/6/2025).

Berjalan beberapa bulan, isu keterakan antara keduanya mulai melamban. Masing-masing menjalankan program. Namun, pada September 2025, hubungan politik mereka kembali memanas.

**Baca juga: [Cara Dadan Tunjuk Mitra SPPG Terafiliasi Dirinya sehingga Dapat Miliaran](#)**

Pada Rabu (17/9/2025), Subandi melantik 61 ASN di Pendopo Delta Wibawa usai melakukan mutasi. Pelantikan ini menjadi sorotan karena tidak nampak adanya kehadiran Mimik sebagai Wabup.

Ternyata, di balik pelantikan tersebut, Mimik mengaku kecewa dan menilai tidak sah atau cacat prosedur. Bahkan, ia menyebut keputusan Subandi tanpa ada pemberitahuan darinya sebagai pengarah Tim Penilai Kerja (TPK).

"Selama TPK bekerja tidak pernah membahas tentang penilaian kinerja para kandidat. Namun hanya menunjukkan nama-nama yang diusulkan oleh tim. Makanya saya bikin surat tanggal 16," terangnya.

**Baca juga: [Kejagung: Yayasan Mitra MBG Terafiliasi Dadan Dkk Nikmati Insentif Miliaran Rupiah Per Hari](#)**

Oleh sebab itu, Mimik menilai bahwa mekanisme ini tidak objektif karena terdapat ASN dengan kinerja baik justru tidak dilantik atau dipindah.

Hype

News

News

Travel

Edukasi

Regional

Regional

Otomotif

News

News

News

News

**Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini 3 Juni 2026, Berangkat dari Pagi hingga Malam**

**Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini Rabu 3 Juni 2026, Berangkat dari Pagi hingga Tengah Malam**

**Kalender 2026: Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Juni-Desember**

**BMKG: Ini Wilayah Berpotensi Hujan dan Angin Kencang pada 3 Juni 2026**

**Hampir 2 Juta Warga Naik KA Rangkasbitung-Merak dalam 5 Bulan, Tarifnya Cuma Rp 3.000**

**BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Selatan Indonesia pada 3–6 Juni 2026**

**KOMPAS.com STORE**

Copyright 2008 - 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.



# Bupati-Wabup Sidoarjo Berkonflik, Pakar: Koalisi Hanya Berorientasi Kemenangan Mudah Retak

Tim Redaksi

**SIDOARJO, KOMPAS.com** - Ketegangan antara Bupati Sidoarjo, Subandi, dan Wakil Bupati, Mimik Idayana, kembali mencuat di publik.

Hal ini terjadi saat pelantikan mutasi 61 aparatur sipil negara (ASN) pada Rabu (17/9/2025), yang menunjukkan adanya masalah serius dalam hubungan keduanya.

Konflik ini bukanlah hal baru, mengingat sebelumnya, keduanya juga pernah diisukan tidak harmonis.

Masalah tersebut berawal dari pernyataan Subandi yang menyebut anggota dewan menghambur-hamburkan uang, serta anggapan bahwa Mimik sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

**Baca juga: [Berseteru Soal Mutasi ASN, Wabup Bakal Laporkan Bupati Sidoarjo ke Kemendagri](#)**

Pakar Politik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ken Bimo Sultoni, menilai bahwa situasi ini mencerminkan fondasi politik lokal di Kabupaten [Sidoarjo](#) yang sangat rapuh dan lebih berorientasi pada kepentingan elektoral.

Ia mengidentifikasi dua faktor utama yang memicu keretakan dalam kepemimpinan Sidoarjo.

"Pertama, lemahnya koalisi politik lokal. Koalisi yang terbentuk saat Pilkada umumnya hanya berorientasi pada kemenangan, bukan visi jangka panjang. Begitu jawaban diperoleh, otomatis koalisi mudah retak," ungkap Ken Bimo pada Kamis (25/9/2025).

Ia menambahkan bahwa jika pembentukan koalisi hanya berfokus pada kemenangan, maka akan muncul persaingan untuk mengakses sumber daya politik dan birokrasi.

Faktor kedua adalah posisi Mimik sebagai wakil bupati, yang secara struktural masih dianggap lemah menurut undang-undang, sehingga tidak memberikan kewenangan eksekutif yang jelas.

**Baca juga: [Bupati Sidoarjo Resmi Berlakukan Aturan Jam Malam Anak, Ada Sanksi Bagi Pelanggarnya](#)**

"Ketika tidak dilibatkan, otomatis ada semacam konflik personal dengan bupati yang mungkin tidak bisa dihindari," ujarnya.

Ken Bimo menduga bahwa masalah mutasi ASN hanyalah puncak dari masalah yang lebih dalam antara keduanya.

"Ada penyakit komorbid yang mengikuti di belakang. Jadi menurut saya ini jadi semacam respons emosi politik yang muncul dari Bu Mimik," imbuhnya.

Akibat dari konflik ini, pemerintah berpotensi kehilangan kepercayaan dari masyarakat, yang dapat berdampak pada pelayanan dan pembangunan.

"Apalagi saya lihat DPRD juga cukup menegang dengan [Bupati Subandi](#). Otomatis konteks politik anggaran juga bermasalah," ujarnya.

Ken Bimo berharap masalah ini tidak berlarut-larut.

**Baca juga: [Bupati Sidoarjo Subandi, Kepala Daerah Terkaya di Jawa Timur](#)**

Ia menekankan bahwa partai pengusung dan Kementerian Dalam Negeri perlu berperan dalam mediasi.

"Partai politik perlu hadir untuk menjaga stabilitas politik. Pemerintah pusat perlu hadir memastikan tata kelola ASN di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai aturan," ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya reformasi kelembagaan bagi wakil kepala daerah agar memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas di ranah pemerintahan.

"Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan harus ditegakkan agar birokrasi tidak terbebas dari tarik menarik kepentingan elite," pungkasnya.

Hype

News

News

Travel

Edukasi

Regional

Regional

Otomotif

News

News

News

News

**Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini 3 Juni 2026, Berangkat dari Pagi hingga Malam**

**Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini Rabu 3 Juni 2026, Berangkat dari Pagi hingga Tengah Malam**

**Kalender 2026: Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Juni-Desember**

**BMKG: Ini Wilayah Berpotensi Hujan dan Angin Kencang pada 3 Juni 2026**

**Hampir 2 Juta Warga Naik KA Rangkasbitung-Merak dalam 5 Bulan, Tarifnya Cuma Rp 3.000**

**BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Selatan Indonesia pada 3–6 Juni 2026**

**KOMPAS.com STORE**

Copyright 2008 - 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.



# Tengahi Konflik Subandi-Mimik Sidoarjo, Parpol Pengusung Dinilai Perlu Turun Tangan

Tim Redaksi

**SIDOARJO, KOMPAS.com** - Pakar politik lokal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Abdul Chalik berharap, partai politik pengusung segera turun tangan mengatasi ketegangan antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana.

Adapun Mimik mengirim surat laporan untuk Bupati [Subandi](#) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mutasi dan pelantikan aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai cacat prosedur.

Masalah tersebut menjadi puncak ketegangan antara kedua pemimpin Kabupaten [Sidoarjo](#) tersebut.

**Baca juga:** [Konflik Bupati-Wabup Sidoarjo, Emil Dardak: Kepala Daerah Harus Akur](#)

Satu bulan setelah pelantikan, tepatnya Maret 2025, hubungan keduanya juga sempat dikabarkan tak harmonis.

Hal itu dipicu Subandi yang menyebut tugas dewan menghambur-hamburkan uang rakyat, dan Mimik merasa dikesampingkan dalam pengambilan putusan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Sidoarjo.

Agar tidak segera berlarut-larut, Chalik mengatakan bahwa pihak yang dapat meredam ketegangan antara Subandi dan Mimik adalah para partai pengusung.

**Baca juga:** [Penampakan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Kenakan Rompi Pink Kejagung](#)

"Tentu yang bisa mendamaikan ya partai pengusung, yang bisa mengajak mereka berbicara," kata Chalik pada Jumat (26/9/2025).

Selain itu, dorongan untuk berbaikan dari para pendukung dan tokoh masyarakat juga bisa menjadi jembatan bagi Subandi dan Mimik.

Pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu, [Subandi-Mimik](#) didukung tiga partai raksasa, yakni Gerindra, Golkar, dan Demokrat.

Selain itu, partai pendukung lainnya, yaitu Hanura, Buruh, BKN, Perindo, Garuda, dan Ummat.

**Baca juga:** [Bupati-Wabup Sidoarjo Berkonflik, Pakar: Koalisi Hanya Berorientasi Kemenangan Mudah Retak](#)

Chalik menyayangkan adanya perseteruan antara pasangan kepala daerah ini.

Sebab, jika terjadi berkepanjangan, akan mengganggu pelayanan masyarakat Sidoarjo.

“Tentu itu akan terganggu manakala tidak ada jalan keluar untuk bisa mengompromikan, melakukan semacam mengkomunikasikan perbedaan keduanya,” ucapnya.

**Baca juga:** [Cara Dadan Tunjuk Mitra SPPG Terafiliasi Dirinya sehingga Dapat Miliaran](#)

Chalik juga mengatakan bahwa tugas wakil bupati secara resmi diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014, yakni wasdalbin (pengawasan, pengendalian, dan pembinaan).

Apabila sudah menyentuh gangguan pada pengawasan dan pertanggungjawaban kepemimpinan, pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat.

“Maka ketika hubungan itu tidak harmonis, maka tentu saja, akan mengganggu terhadap kepemimpinan keduanya, dan tentu itu masyarakat sangat dirugikan,” ucapnya.

Hype

News

News

Edukasi

Regional

Regional

Otomotif

News

News

News

News

News

**Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini 3 Juni 2026, Berangkat dari Pagi hingga Malam**

**Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini Rabu 3 Juni 2026, Berangkat dari Pagi hingga Tengah Malam**

**Kalender 2026: Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Juni-Desember**

**BMKG: Ini Wilayah Berpotensi Hujan dan Angin Kencang pada 3 Juni 2026**

**Hampir 2 Juta Warga Naik KA Rangkasbitung-Merak dalam 5 Bulan, Tarifnya Cuma Rp 3.000**

**BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Selatan Indonesia pada 3–6 Juni 2026**

**KOMPAS.com STORE**

Copyright 2008 - 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

